



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

Anggota-anggota parlemen meminta ASEAN untuk mengambil langkah nyata tentang Myanmar di KTT, bertemu dengan NUG

JAKARTA – Anggota parlemen Asia Tenggara meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menggunakan KTT ASEAN minggu ini untuk mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan situasi bencana di Myanmar, termasuk dengan segera terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

"Sudah hampir satu tahun sejak militer Myanmar melakukan kudeta dan melancarkan kekerasan dan teror yang tak terperiikan terhadap rakyat, dan menghancurkan jutaan nyawa," kata Charles Santiago, ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) dan Anggota Malaysia DPR. "KTT minggu ini harus menjadi kesempatan bagi blok tersebut untuk menerapkan langkah-langkah nyata guna membantu rakyat Myanmar, yang sejak 1 Februari setiap hari telah dengan berani menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak bisa menerima junta pembunuh ini."

APHR berbesar hati karena keputusan ASEAN untuk menolak kehadiran pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN minggu ini, dengan alasan kurangnya kemajuan Konsensus Lima Butir tentang Myanmar yang disepakati pada April lalu, tetapi menyerukan perlu lebih banyak yang harus dilakukan.

"Kami menyadari bahwa ASEAN mengambil langkah besar dalam menolak Min Aung Hlaing dan menyatakan kepadanya bahwa memperlakukan mereka tidak bebas dari konsekuensi. Sekarang para pemimpin regional kita harus menggunakan kesempatan yang belum ada presedennya ini untuk meningkatkan respons mereka lebih jauh, dan membuat kemajuan nyata mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi. Pertama dan terutama, ASEAN harus bertemu secara resmi dan terbuka dengan perwakilan NUG yang terpilih." kata Santiago.

Kredibilitas ASEAN tergantung pada kemampuannya bertindak tegas dan membuat junta militer Myanmar mengakhiri kampanye kekerasan tiada henti terhadap rakyat Myanmar, kata APHR. Secara khusus, militer Myanmar harus berpegang pada Konsensus Lima Butir yang disepakati antara para pemimpin sembilan Negara Anggota ASEAN dan Min Aung Hlaing pada bulan April.

Selanjutnya, ASEAN harus menghentikan mengundang perwakilan junta lainnya ke semua pertemuan resmi ASEAN sampai kekerasan berakhir, semua tahanan politik dibebaskan, dan keinginan rakyat untuk demokrasi sepenuhnya didengar, kata perkumpulan itu.

Negara-negara anggota ASEAN, khususnya Thailand, juga harus didukung oleh kawasan dan mitra dialog ASEAN untuk menanggapi pergerakan pengungsi dengan cara yang menghormati hak asasi manusia, termasuk dengan memberikan bantuan kemanusiaan



dan dengan mengizinkan mereka yang melarikan diri dari Myanmar untuk mencari suaka, APHR dikatakan.

“Selain mengancam stabilitas dan perdamaian regional, jangan lupakan fakta bahwa para pemimpin junta Myanmar juga dituduh melakukan kejahatan terburuk yang bisa dibayangkan, termasuk genosida. Hanya ada satu tempat yang dimiliki Min Aung Hlaing: bukan pada pertemuan ASEAN berikutnya, tetapi di pengadilan internasional,” kata Santiago.